

ABSTRAK

Keberhasilan pendidikan dasar di Sekolah Dasar merupakan langkah awal yang paling strategis untuk menghantarkan lulusannya agar dapat menampilkan keunggulan diri sebagai sosok yang tangguh, mandiri, kreatif serta profesional sesuai dengan bidang masing-masing. Dengan kata lain keberhasilan di Sekolah Dasar merupakan bekal awal yang akan menentukan kualitas murid pada tingkatan sekolah selanjutnya.

Terlepas dari kupasan *output* dan *outcome* Sekolah Dasar yang memuaskan para pengguna (*customers*) maupun pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holders*) bahwa yang jelas, pencapaian harapan di atas memerlukan sosok pimpinan yang profesional, baik pimpinan edukatif maupun teknis struktural. Pembahasan Tesis ini diarahkan untuk meninjau produktivitas kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat II sebagai pimpinan struktural pada level meso yang berperan sebagai Pejabat Eselon III.

Fokus masalah dalam Tesis ini berbunyi: "Bagaimana produktivitas kerja pejabat eselon III di lingkungan Dinas P dan K Tk. II Propinsi Jawa Barat dilihat dari pejabat yang berpendidikan keguruan dan non keguruan".

Penelitian ini dilandasi oleh teori-teori tentang produktivitas; efektif dan efisiensi, manajemen mutu terpadu, kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Berdasarkan teori itu, penulis merangkum adanya beberapa konsep yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan kualitas kerja para Pejabat Eselon III di lingkungan Dinas P dan K Tk II Propinsi Jawa Barat.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data penelitian adalah deskriptif analitik dengan pendekatan naturalistik kualitatif. Sumber data utama, telah dihimpun dari para Kepala Dinas P dan K Tk II Se-Jawa Barat sebanyak 7 orang. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara yang bersifat *snowball sampling*, observasi dan penilaian dokumen.

Berdasarkan analisis hasil penelitian tersebut ditemukan pokok-pokok penelitian antara lain:

1. Pejabat Eselon III yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan ternyata lebih mampu memberikan motivasi bagi personal Sekolah Dasar untuk melaksanakan tugasnya, daripada Pejabat Eselon III yang memiliki latar belakang pendidikan non keguruan. Hal diakui, karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mengetahui permasalahan dan ahli dalam bidang

tersebut akan mempunyai peluang keberhasilan yang lebih besar dari pada orang yang bukan ahlinya.

2. Dalam pengelolaan keuangan untuk keperluan Sekolah Dasar, baik dilihat dari Pejabat yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan maupun non keguruan, ternyata memiliki kemampuan yang sama, yakni mampu memberdayakan keuangan Sekolah Dasar melalui pengelolaan terpadu.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana untuk keperluan Sekolah Dasar dari Pejabat yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan dan non keguruan juga memiliki kemampuan yang baik dan tergolong efektif dan efisien, karena menunjang terselenggaranya proses belajar yang diharapkan.

Sesuai dengan temuan di atas, direkomendasikan bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pengelolaan Sekolah Dasar yang profesional dibutuhkan Pejabat Eselon III (Calon Kepala Dinas P dan K khususnya di Tk. II), yang latar belakang pendidikan keguruan..

Bagi Kepala Dinas P dan K yang memiliki latar belakang pendidikan non keguruan diperlukan tambahan pendidikan tentang ilmu keguruan, sehingga permasalahan sekecil apapun tentang kondisi guru dapat dipahami dengan baik untuk memberikan solusi mengatasi permasalahan tersebut.

Rekomendasi selanjutnya, diarahkan untuk mengajak peneliti-peneliti lain yang berminat, agar melakukan penelitian tentang produktivitas kerja Pejabat dalam kajian yang lebih luas.